

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Mauliyah, N dkk, dalam kehidupan sehari-hari selalu ada suatu kegiatan ekonomi yang berguna untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik itu untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun kelompok. Adapun kebutuhan yang diperlukan bisa meliputi kebutuhan pokok, sandang, pangan, serta papan. Aktivitas pemenuhan ini terwujud dalam bentuk suatu aktivitas transaksi yang dialami dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan mustahil apabila seseorang tidak melakukan aktivitas tersebut.

Setiap orang diberikan suatu keleluasaan untuk mengambil suatu sikap yang berguna untuk mempertahankan hidup dan memenuhi setiap kebutuhannya. Keleluasaan tersebut terwujud sebagai fitrah manusia yang bertujuan untuk mengatur serta memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Setiap manusia dapat memanfaatkan semaksimal mungkin segala sumber daya yang ada. Hal ini terjadi apabila setiap manusia memiliki kesadaran diri dalam melakukan usaha secara efisien, efektif, serta sistematis untuk mengatur dan mengelola segala sumber daya yang tidak terbatas. (Alvien, 2011).

Menurut Mauliyah, N, dkk. suatu kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih dalam menghasilkan suatu kesepakatan bersama dalam hal apapun disebut sebagai transaksi. Pada umumnya, penerapan transaksi dilakukan dalam hal jual beli yaitu mempertemukan seorang penjual dan pembeli dalam melakukan suatu

kesepakatan contohnya seperti kesepakatan dalam menentukan harga pada proses jual beli. Dari sisi pembeli, mereka akan melakukan suatu proses tawar menawar kepada penjual sehingga akan memperoleh harga sesuai yang diinginkan kedua belah pihak sehingga mencapai suatu kesepakatan.

Masih menurut pendapat Mauliyah, N dkk, suatu tawar menawar terjadi karena harga yang ditawarkan atau ditentukan oleh penjual tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Selain itu, aktivitas transaksi lainnya dapat berupa suatu pembayaran. Pembayaran yang dilakukan setelah mencapai suatu kesepakatan antar kedua belah pihak. Menurut bahasa jual beli berarti saling menukar atau suatu pertukaran sehingga menimbulkan suatu proses transaksi.

Suatu kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih dalam hal ini yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua disebut sebagai jual beli. Seorang penjual akan menawarkan barang dagangan yang dimiliki dan pihak pembeli akan membeli barang sesuai kebutuhan dan yang diinginkan. (Wilopo dkk, 2012).

Konteks jual beli sendiri dapat dilakukan dalam berbagai sektor perdagangan. Hal ini tidak luput dari suatu sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu contoh jual beli dalam sektor perkebunan adalah jual beli tembakau. Di Indonesia sendiri banyak daerah-daerah penghasil tembakau dan dijadikan sebagai roda perekonomian kehidupan dan sumber mata pencaharian utama. Tanaman tembakau merupakan suatu hasil pertanian atau perkebunan musiman dan bukan merupakan suatu komoditas pangan melainkan suatu komoditas perkebunan. Tembakau tidak serta merta langsung dikonsumsi sebagai makanan pokok, namun akan diolah dan

dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan rokok dan cerutu. Budidaya tembakau sendiri sangatlah sensitif terhadap lokasi penanaman, musim/cuaca serta bagaimana cara pengolahannya. Tembakau tidak dapat tumbuh secara alami akan tetapi dibudidayakan di berbagai daerah di Indonesia. Kualitas tembakau sangat dipengaruhi oleh lokasi penanaman, kultivar, pengolahan pasca panen dan waktu tanam. Akibatnya, hanya beberapa daerah saja yang menjadi daerah penghasil tembakau terbaik di Indonesia.

Sektor perkebunan tembakau dapat mendorong meningkatkan perekonomian masyarakat daerah penghasil tembakau. Dengan cara adanya perjanjian jual beli antar pengusaha penghasil tembakau dengan pembeli. Pada proses jual beli tembakau dilakukan sebagaimana pada proses jual beli secara umum yaitu dengan mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi.

Dalam kesepakatan jual beli tembakau dikatakan sah jika memenuhi berbagai syarat secara subyektif dan obyektif. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadikan suatu perjanjian antara kedua belah pihak menjadi sah. Suatu perjanjian akan mengikat para pihak yang terlibat terhadap suatu hak dan kewajiban masing-masing, sehingga syarat sah dari suatu perjanjian akan terpenuhi secara mutlak. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menjadi landasan kerjasama atau perjanjian sehingga jika suatu hari terjadi sengketa atau permasalahan, dapat diselesaikan dengan baik dengan didasarkan dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak menggunakan sistem kepercayaan (Aprinelita, 2019).

Dalam jual beli tembakau akan melibatkan suatu asas kepercayaan yang terjadi antara kedua belah pihak. Asas kepercayaan ini bertujuan untuk memberikan suatu mafaat dengan menciptakan suatu keuntungan antar satu sama lain dan tidak saling merugikan. Asas kepercayaan memberikan peran penting bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini memberikan rasa kepercayaan yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli dalam melakukan suatu transaksi jual beli tembakau secara langsung dan konvensional.

Pada transaksi jual beli tembakau yang berlangsung secara konvensional artinya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi yang ada dilakukan dengan cara pembayaran tunai maupun kredit. Sistem pembayaran yang dipilih pun sudah didasarkan atas kesepakatan bersama. Hal ini terjadi karena tidak semua penjual akan melakukan cara pembayaran yang sama atau seragam, Ada yang melakukannya secara langsung atau tunai di tempat, ada pula yang berhutang atau membawa barang (tembakau) terlebih dahulu dan membyarannya di lain waktu, Semua itu terjadi atas kesepakatan bersama dan biasanya dilakukan oleh penjual yang sudah mengenal dan percaya kepada pembelinya.

Dampak dari sistem kepercayaan bisa mengarah ke tindak pidana penipuan. Hal ini bisa saja terjadi apabila ada diantara ke dua belah pihak baik dari penjual atau pembeli yang dengan sengaja melakukan kecurangan dalam proses jual beli atau kesepakatan. Tindak pidana penipuan sendiri bertujuan untuk mendapatkan barang, diberikan hutang, maupun dihapus hutangnya. Orang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 tahun dimana tertera pada pasal 378 KUJH Pidana.

Dari seluruh uraian dan penjelasan yang telah disebutkan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian secara mendalam mengenai Tinjauan hukum pidana jual beli Tembakau Tanpa Dilengkapi Dengan Bukti Tertulis Di Desa Klepu, Kranggan, Temanggung.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut.

1. Bagaimana legalitas dan perlindungan hukum perjanjian jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis?
2. Bagaimana akibat hukum pidana yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan penipuan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana legalitas dan perlindungan hukum perjanjian jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Pidana yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan penipuan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan-masukkan yang berharga bagi para pihak (pengusaha tembakau dan pembeli) agar segala kekurangan yang terjadi dalam praktek dapat diantisipasi lebih dini di kemudian hari.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa atau instansi terkait yang ingin mengetahui Tinjauan hukum pidana jual beli Tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis.

E. Sistematika Penelitian

Data yang terkumpul dari penelitian yang dilakukan kemudian disesuaikan dengan rencana pengelolaannya yaitu disusun ke dalam kelompok-kelompok seperti dalam kerangka penelitian. Adapun kerangka penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bab I : Berisi Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

2. Bab II: Berisi mengenai Kajian Teori

Pada bab ini merupakan uraian teoritis untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas dan penulisan tinjauan pustakan meliputi: pengertian jual beli, .legalitas perjanjian jual beli tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis, dan hukum pidana jual beli yang tanpa menggunakan bukti tertulis.

3. Bab III: Berisi uraian tentang Metode Penelitian

Metode penelitian ini berisi gambaran yang lebih terperinci mengenai objek dan metode penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini. Adapun hal-hal yang akan dijelaskan berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV: Berisi mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam Bab IV ini disajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang berisi uraian tentang fakta-fakta atau data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Penjelasannya meliputi: detesis umum lokasi penelitian, sistem jual beli tembakau, tinjauan hukum pidana jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis. permasalahan yang ada dari sistem jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis dan upaya pemecahaannya di Desa Klepu, Kranggan, Temanggung. dan, analisa data.

5. Bab V : Berisi Penutup

Isi dari bab ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan. Disamping itu penulis juga memberikan masukan atau saran yang dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi pihak yang berkempentingan.

Selanjutnya penulis juga melampirkan:

a). Daftar pertanyaan

Digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

b). Daftar pustaka

Semua buku atau referensi yang menjadi sumber penyusunan tesis ini ditulis lengkap, terutama yang menjadi sumber acuan kutipan dalam teks tesis. Daftar pustaka tersebut akan membantu pembaca untuk mencocokkan keterangan atau kutipan yang terdapat dalam tesis.

c). lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini.